



Pengaruh Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Merlyn Crushselia Naibaho^{1*}, Siti Hodijah², Yohanes Vyn Amzar³

¹⁻³Ekonomi Pembangunan, Universitas Jambi, Indonesia

*Korespondensi Penulis: merlinchruselia@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to determine and analyze the effect of wage levels, economic growth, and the Human Development Index (HDI) on income inequality through labor absorption in the Districts/Cities of Jambi Province from 2020-2024. The research method used is a quantitative descriptive analysis using panel data regression with the Fixed Effect Model approach. The analysis method used Eviews 12. The results showed that partially, income inequality in the Districts/Cities of Jambi Province is significant positive influenced by the wage level variable, while economic growth does not have a significant effect on income inequality. In addition, the Human Development Index (HDI) has a significant negative effect on income inequality. This implies that wage increases are actually followed by in income inequality. Meanwhile, economic growth has not been able to provide a broad income redistribution effect. Conversely, improving the quality of human development proves to be the most effective factor, as it is capable of significant reducing inequalirt levels. Simultaneously, the results show that the variables of wage levels, economic growth, and the Human Development Index (HDI) collectively have a significant influence on income inequality in Districts/Cities of Jambi Province.*

Keywords: *Economic Growth; HDI; Income Inequality; Panel Analysis; Wage Level*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan regresi data panel menggunakan pendekatan model Fixed Effect. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 12. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara persial, ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi di pengaruhi secara signifikan dan positif oleh variabel tingkat upah, namun tidak dipengaruhi secara nyata oleh pertumbuhan ekonomi. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, kenaikan upah justru diikuti peningkatan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi belum mampu memberikan dampak redistribusi pendapatan yang luas. Sebaliknya, peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi yang paling efektif karena mampu menurunkan tingkat ketimpangan secara signifikan. Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Analisis Panel; IPM; Ketimpangan Pendapatan; Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat Upah

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang umumnya diupayakan melalui tiga indikator pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan ketidakstabilan sosial. Ketimpangan pendapatan muncul terjadi akibat perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi tinggi dan rendah. Tingginya ketimpangan mencerminkan distribusi pendapatan di masyarkat yang tidak merata (Salsabila & Pramukty, 2023). Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di suatu daerah yaitu dengan melihat Koefisien Gini (*Ratio Gini*). Nilai Rasio Gini yaitu antara nilai 0 sampai dengan 1. Menurut Badan Pusat Statistik, Ketimpangan distribusi pendapatan yang juga di ukur menggunakan

Rasio Gini di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dalam nilai Rasio Gini, nilai tersebut masuk dalam kategori sedang, dengan nilai rata-rata Indeks Gini $< 0,5$. Nilai Indeks Gini Provinsi Jambi tiap tahunnya tidak pernah merata atau fluktuatif pada periode 2019 sebesar 0,321 hingga 2024 sebesar 0,315 yang merupakan adanya penurunan 0,02 poin. Namun, pada Maret tahun 2023 Indeks Gini sebesar 0,343 yang tertinggi pada periode gabungan (perkotaan dan perdesaan) tersebut. Ketimpangan pendapatan pada tahun tersebut berada pada kategori sedang atau pendapatan masyarakat belum merata. Selanjutnya, Perdesaan memiliki nilai rasio terendah setiap tahunnya berada di bawah nilai 0,30, yang menunjukkan distribusi di desa jauh lebih merata dan nilai tertinggi berada pada perkotaan pada Maret 2022 yaitu sebesar 0,376 di daerah perkotaan.

Kondisi dari belum meratanya pendapatan tersebut menunjukkan adanya faktor ekonomi yang memengaruhi distribusi pendapatan, salah satunya merupakan upah yang menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga. Upah tersebut tercermin dalam kebijakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan upah minimum di setiap provinsi dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pendapatan (Julihanza & Khoirudin, 2023). Dalam hal ini, menurut Rahayu, (2019) penetapan upah minimum bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi serta menjamin penghasilan yang layak. Namun demikian, upah minimum berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menekan kesenjangan pendapatan dan peningkatan upah minimum dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja (Karimi et al., 2023). Sutiono & Syafitri, (2018) kenaikan upah akan menguntungkan mereka yang terlibat dalam perekonomian, berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, serta pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nengsih et al., (2023) Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dipergunakan dalam menilai perkembangan ekonomi di sebuah wilayah, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pertumbuhan aktivitas perekonomian yang menimbulkan barang atau jasa yang di produksi masyarakat bertambah secara terus-menerus serta ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah dalam periode tertentu. Selain itu, Kondisi terhadap ketahanan ekonomi suatu daerah tidak hanya bergantung pada nilai pertumbuhan, namun pada kualitas sumber daya manusia sebagai penggeraknya. Kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dapat terjaga dari hambatan ekonomi melalui pembangunan manusia. Studi oleh Maorencia & Marwan, (2023) mengatakan bahwa dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, maka pendistribusian pendapatan antar penduduk semakin merata. Serta meningkatnya sumber daya manusia (SDM) mencerminkan produktivitas manusia yang diakibatkan oleh tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) tersebut. Peningkatan

pembangunan manusia diharapkan dapat mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata, karena manusia yang berkualitas lebih mampu bersaing di pasar kerja dan menciptakan nilai tambah ekonomi (Heni Meidiyan et al., 2025).

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat kesenjangan daerah kabupaten/kota dengan ketimpangan disparitas pendapatan di Provinsi Jambi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai Pengaruh Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2. KAJIAN TEORITIS

Ketimpangan Pendapatan

Kondisi merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah atau negara dikalangan penduduknya disebut disparitas pendapatan (Janah, 2022). Menurut Arsyad, (2010), ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan dimulai dari munculnya sebuah hipotesa yang dikenal yaitu Hipotesis U terbalik (*Interved U curved*) oleh Simon Kuznets tahun 1955. Kuznets berpendapat bahwa awal mula saat pembangunan dimulai dari distribusi pendapatan yang tidak merata, namun saat tercapainya suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan merata. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan melalui Koefisien Gini, merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien Gini terletak antara nol dan satu. Jika nilai koefisien Gini sebesar 0,50 sampai 0,70 berarti ketidakmerataan tinggi, 0,36 sampai 0,49 berarti ketidakmerataan sedang dan 0,20 sampai 0,35 berarti ketidakmerataan rendah. Dari uraian diatas terlihat bahwa semakin kecil koefisien Gini, semakin rendah ketimpangan pendapatan pada suatu populasi tertentu.

Tingkat Upah

Upah merupakan sumber utama penghasilan seseorang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk memenuhi kebutuhan pekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam sistem pengupahan, sebagian besar analisis mengenai perbedaan upah didasarkan pada model keseimbangan pasar tenaga kerja, tingkat upah diasumsikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, secara teori ekonomi modern oleh Mankiw, (2014) menyatakan bahwa pasar persaingan sempurna, upah ditentukan melalui nilai produk marginal tenaga kerja. Namun, ketika pemerintah menetapkan upah minimum sebagai harga dasar, kebijakan tersebut dapat memengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja. Perbedaan tingkat upah juga menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan upah

minimum yang bertujuan untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu. Diberlakukannya upah minimum berdampak pada tarif ternaga kerja akan meningkat, sehingga permintaan tenaga kerja akan berkurang (Sutomo, 2023).

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan mempunyai tujuan yaitu pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan. Dalam Sutomo, (2023) mengemukakan hal tersebut didasarkan pada teori *trickledown effect*. Teori *trickle-down effect* pertama kali dikembangkan oleh Albert Otto Hirschman. Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya merembes atau berdampak ke masyarakat luas. Selanjutnya, berkaitan dengan teori Kuznets yang menggambarkan hubungan kurva U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan cenderung meningkatkan ketimpangan karena hanya segelintir sektor atau kelompok yang mampu memanfaatkannya. Namun, seiring berjalannya waktu pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ke kelompok berpendapatan rendah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Pertumbuhan ekonomi ini telah lama dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, berikut beberapa indikator pertumbuhan ekonomi antara lain; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan PDRB, dan Pendapatan Per Kapita.

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan-pilihan penduduk (*enlarging people's choices*). Pilihan yang paling penting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak. Teori oleh United Nation Development Programme (UNDP) mengatakan tentang *Human Development Report* (HDR) atau Laporan Pembangunan Manusia pada tahun 1990. Menurut (UNDP, 2010) konsep pembangunan manusia menekankan keberlanjutan, kesetaraan, dan pemberdayaan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Pilihan yang paling krusial adalah untuk menjalani kehidupan panjang dan sehat, berpendidikan, dan menikmati standar hidup layak. Tujuannya adalah pembangunan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi (PDB) menjadi fokus pada manusia sebagai kekayaan sejati bangsa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel di peroleh dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2020 hingga 2024. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan publikasi situs internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan kuantitatif.

Dalam menguji dan menganalisis Tingkat Upah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu gabungan antara data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan alat analisis aplikasi *Eviews12*. Adapun model yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 Upah_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KP_{it} = Indeks Gini (ketimpangan pendapatan) Kabupaten/Kota i pada waktu t

β_0 = Konstanta (intersep)

$Upah_{it}$ = Upah Minimum Kabupaten/Kota i pada waktu t

PE_{it} = Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota i pada waktu t

IPM_{it} = Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota i pada waktu t

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien estimasi variabel

ε_{it} = *Error term* di Kabupaten/Kota i pada waktu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kondisi Tingkat Upah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Berdasarkan data perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024, mengalami kenaikan menunjukkan tren pertumbuhan, dengan rata-rata kenaikan tahunan yang bervariasi setiap tahunnya. Kota Jambi menunjukkan nominal upah tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, dimana pada tahun 2024 mencapai Rp 3.387.064 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,54% per tahun. Tingginya nilai upah di Kota Jambi menggambarkan posisi strategisnya sebagai pusat aktivitas ekonomi, seperti perdagangan dan jasa dengan penyesuaian upah sejalan dengan biaya hidup dan produktivitas perkotaan. Selanjutnya, diikuti dengan Kabupaten Muaro Jambi, memiliki laju pertumbuhan rata-rata yang tinggi di tingkat provinsi sebesar 4,84% per tahun, mencapai Rp 3.172.413 pada tahun 2024. Sebaliknya, terdapat sejumlah wilayah yang memiliki pertumbuhan cenderung

lebih rendah, yaitu 3,71% pertahun. Wilayah tersebut mencakup Kabupaten Batang Hari, Kerinci, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Bungo, dan Kota Sungai Penuh, yang pada tahun 2024 menetapkan upah menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi sebesar Rp 3.037.121. Hal ini mencerminkan adanya ketergantungan pada kebijakan pemerintah daerah dalam menyesuaikan tingkat upah terhadap kebutuhan hidup layak dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil Analisis Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Data perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan nilai PDRB ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi barang dan jasa di tingkat regional mengalami ekspansi riil yang menjadi roda utama penggerak perekonomian daerah. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir, Kabupaten Muara Jambi merupakan daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 6,11% per tahun, diikuti oleh Kabupaten Batang Hari sebesar 5,95% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan di Kabupaten Muara Jambi dan Batang Hari menverminkan efektivitas pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Sebaliknya, wilayah basis industri padat modal seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata terendah yaitu sebesar 1,90% per tahun. Meskipun secara nominal PDRB di wilayah tersebut besar, rendahnya laju pertumbuhan mengindikasikan adanya perlambatan atau stagnasi pada sektor sektor yang mendominasi struktur ekonomi di wilayah tersebut dibandingkan kabupaten lainnya. Namun, adanya dinamika ekonomi yang beragam di Provinsi Jambi, dimana daerah pusat jasa dan perdagangan seperti Kota Jambi tumbuh stabil sebesar 5,16% per tahun.

Hasil Analisis Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kenaikan angka IPM ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat berkelanjutan, yang didorong oleh peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, Pendidikan, serta pengeluaran riil. Kota Jambi, mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan tingkat pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Jambi, dengan angka IPM yang terus meningkat hingga mencapai 81,77 pada tahun 2024, merupakan kategori pembangunan manusia sangat tinggi, yang didukung oleh infrastruktur sosial dan pusat ekonomi yang lebih maju dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, Kota Sungai Penuh merupakan daerah yang pertumbuhan rata-ratanya paling rendah sebesar 0,82%, namun angka pembangunannya

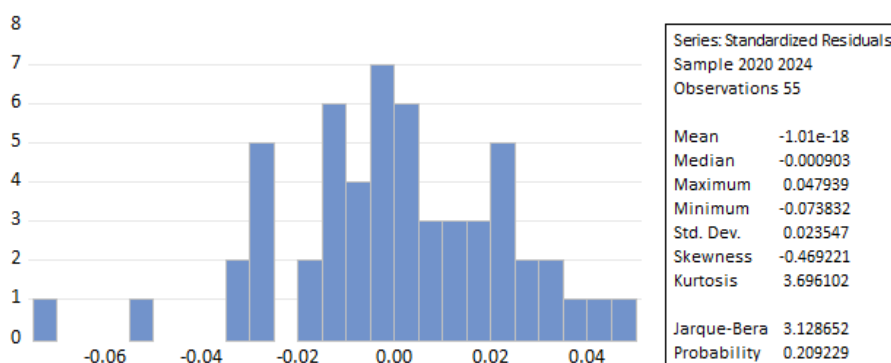
mencapai 77,93 pada tahun 2024. Secara umum, kenaikan IPM di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi menjadi upaya pembanguna yang tidak hanya berfokus pada aspek material seperti PDRB saja, melainkan juga pada pengembangan kapasitas manusia. Meskipun terdapat variasi capaian antarwilayah, di mana daerah perkotaan memiliki peran yang cukup besar dan unggul, pertumbuhan rata-rata yang stabil di tingkat kabupaten menunjukkan adanya pemerataan akses pembangunan di tingkat regional.

Hasil Analisis Kondisi Ketimpangan Pendapatan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Perkembangan rasio gini di Provinsi Jambi sepanjang 2020–2024 menunjukkan pola pertumbuhan yang sangat berfluktuasi antar kabupaten/kota. Hampir seluruh daerah mengalami dinamika perubahan ketimpangan yang tidak bergerak secara stabil, melainkan naik dan turun dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, Kota Jambi menunjukkan tingkat ketimpangan tertinggi dengan nilai rata-rata 0,369. Pada tahun 2024, Kota Jambi merupakan daerah yang memiliki nilai Indeks Gini dengan mencapai 0,395, yang mengindikasikan bahwa distribusi di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yang disebabkan adanya variasi terhadap jenis pekerjaan dengan pendapatan. Sebaliknya, Kabupaten Merangin merupakan daerah yang paling menekan kesenjangan ekonomi dengna laju penurunan Indek Gini rata-rata mencapai -4,55% per tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat di wilayah tersebtu selama lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, keberagaman angka Indeks Gini di Provinsi Jambi berada pada rentang 0,2 hingga 0,3 menunjukkan tingkat ketimpangan yang masuk dalam kategori sedang, berfluktuasi yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah belum mampu menjamin pemerataan secara signifikan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data di Olah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 3.128652. Nilai probabilitas sebesar 0,209229 yang lebih besar dari 0,05 juga menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

	Upah	PE	IPM
Upah	1000000	0.295621	0.559154
PE	0.295621	1000000	0.251789
IPM	0.559154	0.251789	1000000

Sumber: Data di Olah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Dengan ketentuan *correlation matrix* < 0,8 maka di antara variabel independen yaitu tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.009366	0.009726	-0.962920	0.3412
UPAH	-2.14E-09	1.45E-09	-1.477567	0.1472
PE	-4.59E-05	5.45E-05	-0.841877	0.4047
IPM	0.000233	0.000180	1.294712	0.2027

Sumber: Data di Olah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil olahan, diperoleh nilai probabilitas residual variabel independen tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks Pembangunan manusia sebesar 0.1472, 0.4047, 0.2027 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Hasil Pemilihan Model

a) Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.709859	(10,41)	0.0119
Cross-section Chi-square	27.906142	10	0.0019

Sumber: Data di Olah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan Tabel diatas hasil uji Chow, diketahui bahwa nilai Probabilitas Cross-section F sebesar 0.0119 dan Probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0.0019, yang keduanya $< \alpha$ (5%) berarti nilai p-value $< (0,05)$. Dengan demikian, model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

b) Uji Hausman

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.450223	3	0.0060

Sumber: Data di Olah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan Tabel 5.6 hasil uji Hausman, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar $0.0060 < \alpha$ (5%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai untuk digunakan adalah Fixed Effect Model.

Hasil Analisis Estimasi Persamaan Data Panel

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.809994	0.280275	2.889998	0.0061
UPAH?	9.65E-08	4.17E-08	2.311529	0.0259
PE?	0.000863	0.001572	0.549077	0.5859
IPM?	-0.010918	0.005195	-2.101642	0.0418
Fixed Effects (Cross)				
_1--C	-0.007171			
_2--C	0.001018			
_3--C	0.010451			
_4--C	0.009441			
_5--C	-0.017208			
_6--C	-0.077434			
_7--C	-0.053819			
_8--C	-0.037823			
_9--C	-0.009379			
_10--C	0.125197			
_11--C	0.056727			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.549713	Mean dependent var	0.302455	
Adjusted R-squared	0.406939	S.D. dependent var	0.035090	
S.E. of regression	0.027023	Akaike info criterion	-4.168914	
Sum squared resid	0.029940	Schwarz criterion	-3.657957	
Log likelihood	128.6451	Hannan-Quinn criter.	-3.971323	
F-statistic	3.850233	Durbin-Watson stat	2.200360	
Prob(F-statistic)	0.000463			

Sumber: Data di Olah dengan Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect (Effect Specification: Cross-section fixed), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 Upah_{it} + \beta_2 PE_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$KP_{it} = 0.809994 + 9.65E-08 Upah_{it} + 0.000865 PE_{it} - 0.010918 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Interpretasi dari hasil persamaan model di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0.80994 menunjukkan bahwa apabila variabel tingkat upah (UPAH), pertumbuhan ekonomi (PE), dan indeks pembangunan manusia (IPM) dianggap konstan atau bernilai nol, maka rata-rata nilai variabel Ketimpangan pendapatan (KP) adalah sebesar 0.81 Kabupaten/Kota.
2. Variabel tingkat upah (UPAH) memiliki koefisien regresi sebesar 9.65E-08 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0259 < 0.05$, menunjukkan bahwa variabel tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki koefisien regresi sebesar 0.000863 dengan nilai probabilitas sebesar $0.5859 > 0.05$, disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable ketimpangan pendapatan.
4. Variabel indeks pemabngunan manusia (IPM) memiliki koefisien regresi sebesar -0.010918 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0418 < 0.05$, menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negative dan signfikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Selanjutnya, penggunaan model *Fixed Effect* dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adanya efek spesifik antar unit *cross-section*. Berdasarkan hasil estimasi, terdapat perbedaan intersep untuk masing-masing dari 11 unit Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Unit ke 10-c merupakan wilayah Kota Jambi memiliki nilai efe positif tertinggi sebesar 0.125197, sedangkan unit ke 6-c (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) memiliki nilai efek negated terendah sebesar -0.0774434. Perbedaan nilai intersep ini menunjukkan adanya karakteristik atau faktor-faktor spesifik di setiap wilayah/unit yang tidak teramati dalam model namun turut memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Uji Hipotesis

Uji F

Hasil dari regresi *Fixed effect* nilai F-Hitung sebesar $3.850233 > F\text{-tabel}$ sebesar 2.79. Nilai Probabilitas F-statistic $0.000463 < 0.05$. Maka, secara simultan variabel tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat signifikansi 5%.

Uji t

Hasil dari regresi *Fixed effect* pada uji t melalui perbandingan antara nilai t-hitung dan t-tabel, maka hasil secara persial sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat upah (UPAH) terhadap ketimpangan pendapatan (KP)
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, nilai t-hitung sebesar $2.311529 > t\text{-tabel}$ sebesar 2.00558. Dengan nilai probabilitas sebesar $0.0259 < 0.05$, hasil menunjukkan bahwa variabel tingkat upah berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap ketimpangan pendapatan (KP)
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, nilai t-hitung sebesar $0.549077 < t\text{-tabel}$ sebesar 2.00558. Dengan nilai probabilitas sebesar $0.5859 > 0.05$, hasil menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan (KP)
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, nilai t-hitung sebesar $-2.101642 > t\text{-tabel}$ sebesar 2.00558. Dengan nilai probabilitas sebesar $0.0418 < 0.05$, hasil menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Koefisien Determinasi R^2

Hasil dari analisis regresi *Fixed effect* nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,549 yang artinya variabel independen yaitu tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia menjelaskan variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 54,7%. Sementara sisanya sebesar 45,3% dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis statistic yang diperoleh memiliki koefisien sebesar $9.65E-08$ dengan nilai probabilitas sebesar $0.0259 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2024. Analisis menunjukkan upah minimum pada Kabupaten/Kota di Provinsi cenderung berasosiasi dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Fenomena ini dapat terjadi apabila kenaikan upah hanya dinikmati oleh sektor-sektor tertentu atau tenaga kerja terampil (*skilled labor*), sementara tenaga kerja di sektor informal atau tidak terampil mengalami kenaikan yang setara. Akibatnya, distribusi

pendapatan menjadi tidak merata dan meningkatkan ketimpangan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Putri & Hanifa, 2024) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan penelitian menurut (Wulandari et al., 2025) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis statistic yang diperoleh memiliki koefisien sebesar 0.000863 dengan nilai probabilitas sebesar $0.5859 > 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2024. Kondisi ini kemungkinan muncul karena distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi tidak merata, dimana sebagian besar keuntungan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif atau belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sejalan dengan teori *trickle-down effect* yang tidak berjalan maksimal sehingga tidak memberikan dampak statistic yang nyata terhadap perubahan struktur ketimpangan. Selanjutnya, sejalan dengan penelitian oleh (Heni Meidiyan et al., 2025; Wulandari et al., 2025) yang menyatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi kemungkinan masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu atau hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis statistic yang diperoleh memiliki koefisien sebesar -0.010918 dengan nilai probabilitas sebesar $0.0418 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari tahun 2020 hingga 2024. Koefisien negative menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, akan secara nyata menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga mereka memiliki akses pendapatan yang lebih baik dan mampu memperkecil kesenjangan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan (Heni Meidiyan et al., 2025) yang menyatakan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia memungkinkan lebih banyak penduduk mengakses Pendidikan dan layanan Kesehatan yang memadai, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu tetapi juga menjadi pendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kondisi indikator ekonomi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2020 hingga 2024. Diketahui bahwa ketimpangan pendapatan menunjukkan hasil fluktuatif, terdapat disparitas yang cukup terlihat antara daerah perkotaan seperti Kota Jambi dengan Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kerinci. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa Kabupaten, seperti Kabupaten Muaro Jambi dan Batang Hari seharusnya mejadi basis struktural penting untuk terus meningkatkan standar pengupahan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi tersebut guna meminimalisir angka disparitas wilayah dan mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih inklusif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2020-2024. Selanjutnya, secara persial atau individu, variabel tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sedangkan, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Heni Meidiyan, Asrini, & Irmanelly. (2025). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(3), 623–636. <https://doi.org/10.63822/0pa9km04>
- Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode tahun 2019–2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 23–43. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.183>
- Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93>
- Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani, T. (2023). Pengaruh penanaman modal asing, indeks persepsi korupsi, kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 107–116. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4775>
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of economics* (7th ed.). Cengage Learning.

- Maorencia, Q. M., & Marwan, M. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Arzusin*, 3(5), 571–580. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v3i5.1672>
- Nengsih, E. H., Tan, S., & Achmad, E. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di kabupaten/kota Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(2), 1898–1906. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1498>
- Putri, R. N., & Hanifa, N. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 105–114. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65963>
- Rahayu, Y. (2019). Pengaruh upah minimum provinsi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 7(2). <https://doi.org/10.53978/jd.v7i2.143>
- Salsabila, N. A., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh investasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1586>
- Sutiono, F., & Syafitri, W. (2018). Belanja kementerian/lembaga, belanja APBD, kontribusi sektoral, dan ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(3), 186–201. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.75>
- Sutomo, D. A. (2023). *Analisis ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2010–2021* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/28598/>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2010). *Human development report 2010: The real wealth of nations—Pathways to human development*. <http://hdr.undp.org>
- Wulandari, D. A., Zulgani, Z., & Achmad, E. (2025). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten terhadap ketimpangan pendapatan di dalam Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(11), 513–520. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.7218>